BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak merupakan masalah kompleks dalam bidang pendapatan. Perencanaan dan khususnya pengoperasian sistem pemungutan pajak membutuhkan keahlian yang maksimal. Apalagi ditambah dengan banyak sekali waktu yang tersita hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat rutinitas, seperti surat-menyurat dalam bidang perpajakan, penyuluhan kepada wajib pajak, pengecekan formulir dan lain-lain. Dengan demikian, masalah spesialisasi, waktu dan penentuan pegawai menjadi sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektifitas suatu sistem pemungutan pajak.

Secara keseluruhan, SAMSAT cukup baik dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem dan penerimaan pendapatan. Tetapi, SAMSAT inipun masih memiliki kelemahan dari sistem pemungutannya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan penyebaran kuesioner kepada 20 orang responden dengan syarat-syarat tertentu, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang sering menghambat sistem pemungutan PKB antara lain seperti yang tercantum dalam tabel kuesioner sebagai berikut :

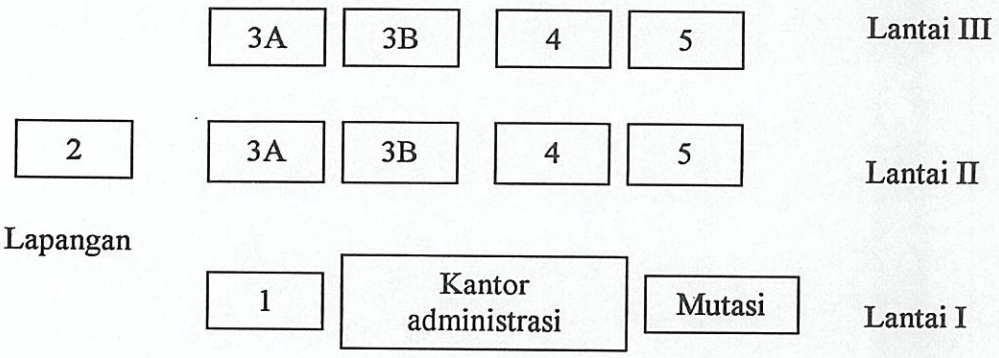
NO	PERNYATAAN	%
1	Untuk melakukan pendaftaran ulang membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan tidak efisiennya sistem pemungutan PKB.	84 %
2	Penyuluhan dari aparat perpajakan kurang.	81 %
3	Letak loket-loket pengurusan PKB simpang siur sehingga menyebabkan ketidakefisienan sistem.	72 %
4	Jumlah aparat perpajakan dan peralatan pendukung kurang sehingga proses pengurusan PKB lambat.	78 %
5	Loket pendaftaran PKB dan SWDKLLJ dilakukan secara terpisah.	66 %
6	Biaya administrasi terlalu banyak dan perlu untuk ditinjau kembali.	70 %
7	Dalam mengurus pendaftaran ulang banyak menggunakan formulir.	75 %
8	Belum terdapat sinkronisasi data antara wp pascabayar dengan wp prabayar.	65 %
9	Untuk pendaftaran ulang lebih cepat menggunakan jasa pihak ketiga/orang lain.	83 %
10	Wajib pajak belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan.	70 %
11	Pelaksanaan pemungutan PKB sering tidak sesuai dengan ketentuannya.	74 %
12	Perlu diadakan penyederhanaan tarif dalam metode pembebanannya.	73 %

Tabel 3. Hasil jawaban kuesioner dari 20 orang responden

Selain melakukan penyebaran kuesioner juga dilaksanakan penelitian observasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai efisiensi sistem pemungutan PKB. Pada prosedur penagihan melalui SPKPKB dan atau Surat Peringatan seringkali terlambat diterima oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak mengeluh karena mereka telah membayar PKB sebelum SPKPKB dan atau Surat Peringatan sampai. Disini belum terdapat adanya sinkronisasi antara data wajib pajak yang telah membayar (pascabayar) dengan wajib pajak yang belum membayar (prabayar).

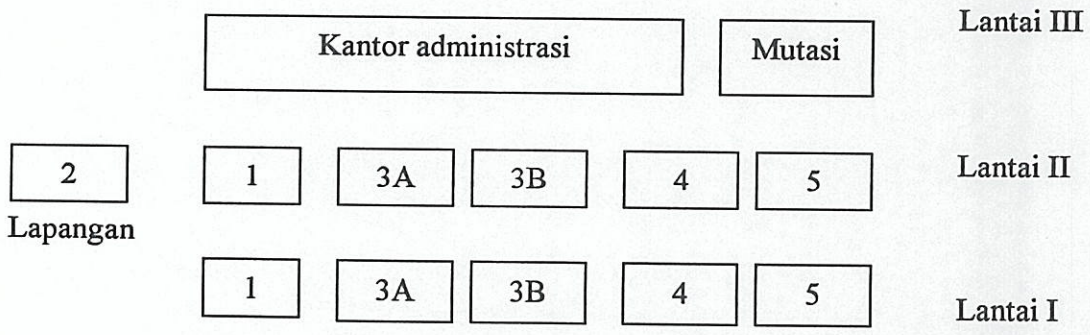
Sedangkan pada pelaksanaan prosedur-prosedur di SAMSAT, faktor tempat (loket) dan waktu merupakan faktor penghambat utama yang menyebabkan sistem

pemungutan PKB menjadi tidak efisien. Dibawah ini adalah letak loket-loket pengurusan PKB :



Gambar 5.Letak loket pengurusan PKB di SAMSAT

Sebenarnya pemisahan antara kendaraan bermotor beroda dua dengan kendaraan bermotor beroda empat cukup baik mengingat jumlah dan jenis kendaraan bermacam-macam. Tetapi, untuk mempermudah proses pengurusan sistem pemungutan PKB sebaiknya letak loket diubah menjadi :



Gambar 6. Letak loket usulan perubahan

Akibat dari lamanya waktu pengurusan PKB, 83 % dari 20 responden menyatakan bahwa untuk mengurus pendaftaran ulang PKB lebih cepat menggunakan jasa orang lain sehingga mereka tidak kehilangan waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, selain letak loket yang sebaiknya diletakkan berdekatan, diperlukan

adanya penambahan aparat perpajakan dengan keahlian maksimal dan peralatan pendukung untuk mencapai tingkat efisiensi sistem yang maksimal pula.

Selain itu, formulir SPT yang diterima wajib pajak sering tidak diisi dan membuat proses penyelesaian menjadi lama. Dalam hal ini, aparat pajak sebaiknya memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memahami bagaimana cara mengurus PKB yang baik dan benar.

4.2. Analisis Perkembangan Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk menganalisa perkembangan penerimaan PKB selama Tahun Anggaran 1997/1998 akan diuraikan berdasarkan laporan bulanan penerimaan PKB Tahun Anggaran 1997/1998 yang diperoleh dari cabang Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

BULAN	PKB POKOK	DENDA	TUNGGAKAN	TOTAL	% (thd target)
APRIL	3.564.936.550,00	126.192.620,00	56.902.385,00	3.748.031.555,00	94 %
MEI	3.177.382.875,00	114.735.250,00	4.453.900,00	3.296.572.025,00	83 %
JUNI	3.648.849.395,00	141.883.325,00	1.403.775,00	3.792.136.495,00	95 %
JULI	3.811.654.825,00	151.694.455,00	1.096.400,00	3.964.445.680,00	99 %
AGUSTUS	3.737.921.637,00	127.825.090,00	225.925,00	3.865.972.652,00	97 %
SEPTEMBER	3.806.144.549,00	131.001.850,00	2.886.640,00	3.940.033.039,00	99 %
OKTOBER	4.047.770.859,00	139.250.940,00	1.552.650,00	4.188.574.449,00	105 %
NOPEMBER	3.356.648.170,00	99.697.600,00	82.812.920,00	3.539.268.990,00	89 %
DESEMBER	3.829.785.600,00	118.776.775,00	108.005.820,00	4.056.568.195,00	101 %
JANUARI	3.686.312.668,00	95.697.600,00	74.791.640,00	3.856.801.908,00	97 %
PEBRUARI	3.151.287.133,00	125.206.775,00	68.013.870,00	3.344.507.778,00	84 %
MARET	3.413.230.333,00	119.771.175,00	86.562.125,00	3.619.563.633,00	91 %
TOTAL	**43.231.924.594,00**	**1.491.843.755,00**	**488.708.050,00**	**45.212.476.399,00**	**94,5 %**

Sumber : laporan penerimaan bulanan cabang Dipenda

Tabel 4. Laporan penerimaan PKB dan peningkatannya

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan penerimaan PKB pada bulan Oktober sebesar Rp 4.188.574.449,00 (105 %) dan pada bulan Desember sebesar Rp 4.056.568.195,00 (101 %). Begitu pula pada penerimaan tunggakan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 488.708.050,00 atau 122,18 % terhadap target. Tetapi, kenaikan ini tidak memberi pengaruh yang sangat berarti pada penerimaan PKB selama tahun anggaran tersebut. Secara keseluruhan, penerimaan PKB pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan menjadi 94,5 % dan tidak dapat melampaui target sebesar Rp 47.873.000.000,00 yang ditetapkan.

4.3. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Penerimaan Kas pada Cabang Dipenda

Untuk menilai apakah sistem pemungutan PKB memiliki hubungan yang kuat atau tidak terhadap penerimaan PKB, akan dibuktikan melalui perhitungan dengan korelasi jenjang Spearman berikut ini :

SP PKB (x)	Penerimaan (y) dalam jutaan	Rank x	Rank y	D = (x-y)	D^2
84	3.748	1	8	-7	49
81	3.296	3	12	-9	81
72	3.792	8	7	1	1
78	3.964	4	3	1	1
66	3.865	11	5	6	36
70	3.940	10	4	6	36
75	4.188	5	1	4	16
65	3.539	12	10	2	4
83	4.056	2	2	0	0
71	3.856	9	6	3	9
74	3.344	6	11	-5	25
73	3.619	7	9	-2	4
					262

Tabel 5. Perhitungan korelasi jenjang Spearman

Maka diperoleh :

$$R_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n=20} d_i^2}{20^3 - 20}$$

$$R_s = 1 - \frac{6 \quad x \quad 262}{20^3 - 20}$$

$$R_s = 1 - \frac{1572}{7980}$$

$$= 0{,}803$$

Dengan menggunakan tabel penolong korelasi jenjang Spearman (lampiran), digunakan uji signifikansi dengan tingkat kesalahan 1 % dan 5 % dengan n = 20, maka untuk α = 1 %, R kritik = 0,5203 dan untuk α = 5 %, R kritik = 0,3789.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem pemungutan PKB cukup besar terhadap penerimaan PKB yaitu sebesar **0,803** dan tidak efisiensinya sistem pemungutan PKB ini dapat mempengaruhi menurunnya penerimaan PKB sehingga tidak dapat melampaui target yang diharapkan.